

## MENINGKATKAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM MEMBERDAYAKAN SEKOLAH

Oleh: Arief Rohman<sup>1</sup>

### Pendahuluan

Menurut Mochtar Mas'ud (1997:30), salah satu model pendekatan rejim Orde Baru dalam memerintah adalah pendekatan yang memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara (*state*) sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan ini dikenal dengan "*politik sebagai panglima*" yang menempatkan kekuasaan politik dengan ideologi "*statist*" untuk melakukan intervensi ke dalam segenap kehidupan warga negara dengan dalih "*pembangunan*". Asumsi dari pendekatan ini adalah kekuatan negara diidentikkan dengan terjaminnya keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan (kemakmuran rakyat).

Dengan alasan di atas, rejim Orde Baru yang telah berkuasa sejak tahun 1967 tersebut semakin berani menampakkan wajah represifnya untuk menindas warga sipil termasuk guru dan kekuatan kritis lainnya yang dianggap "*membangkang*", apalagi sampai "*melawan*" negara. Potret penindasan ini mencapai klimaknya ketika semakin banyak warga masyarakat yang kehilangan hak-haknya, tidak saja pada hak-hak *ekonomi* seperti hak bekerja secara aman, memperoleh gaji secara layak, hak atas tanah; pun pula hak-hak *politik* seperti hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan mendapatkan perlakuan

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

sama di depan hukum dan pemerintahan. Bahkan perampasan oleh negara juga merambah kepada hak paling dasar warga negara yaitu hak untuk hidup dan bebas dari ketakutan. Sehingga pada puncak penindasan itulah, banyak warga sipil yang diculik, dipenjara, serta dihilangkan secara paksa (dibunuh) dengan menafikan kaidah-kaidah demokrasi dan Hak Azasi Manusia.

Dalam kondisi demikian, sangat sedikit dari kalangan pakar dan praktisi pendidikan termasuk guru yang berani menyuarakan kebenaran apalagi melakukan oposisi dan pembelaan terhadap masyarakat tertindas. Para guru dan kalangan pendidikan pada umumnya, malahan ikut melegitimasi terhadap kepongahan rejim Orde Baru untuk tetap berkuasa sampai tiga puluh dua tahun lamanya. Sebuah periode waktu yang amat panjang dari rata-rata sebuah rejim berkuasa. Keberadaan sekolah dan guru seolah membiarkan terjadinya distorsi penyelenggaraan kekuasaan bahkan rela menjadi alat dan mesin kekuasaan dalam rangka menciptakan *status quo* melalui apa yang disebut "*sosialisasi ideologi*" (Escobar, 1998:29).

*Ideologi* yang dimaksud adalah sebuah ideologi yang secara imperatif mengajarkan kepada masyarakat yang sekaligus menguasai struktur kognitif masyarakat itu khususnya pelajar agar mereka secara sadar bersedia tunduk dan patuh kepada rezim penguasa (Nazar Patria dan Andi Arief, 1999:38). Dalam perspektif ilmu politik, ideologi yang demikian itu disebut *ideologi hegemonik*. Sehingga dengan ideologi hegemonik tersebut, penguasa akan memperoleh legitimasi lebih kuat untuk tetap menguasai masyarakat dan memegang kekuasaan.

Idealnya adalah, kalangan pendidikan khususnya guru bisa menampilkan dirinya secara kritis sebagai kekuatan pembebas--*Liberation* (Freire dalam Escobar, 1998). Guru seharusnya mampu mengkondisikan siswa untuk mengenal

dan mengungkap realitas senyatanya secara kritis serta bebas dari belenggu praktek penindasan (Paulo Freire, 2000:176), apalagi ketika era reformasi mulai bergulir seiring dengan tumbanganya Orde Baru tahun 1998. Oleh karena guru merupakan kekuatan pembebas, maka konsekwensinya mereka sudah tidak lagi melakukan 'domestikasi' terhadap peserta didiknya, melainkan lebih kepada praktek 'penyadaran' (*conscientization*).

Mereka tidak lagi berperan sebagai agen sosialisasi ideologi dari sebuah rejim, akan tetapi lebih sebagai kekuatan kontra-ideologi atau kontra wacana (*counter-discourse*) terhadap wacana resmi milik sang rejim yang dianggap memiliki makna hegemonik. Serta tidak mau lagi dirinya 'diobok-obok' terlalu jauh oleh sang rejim dengan dalih apapun dalam rangka menemukan otonomi dan kewenangannya.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas lebih jauh mengenai upaya pemberdayaan sekolah melalui peningkatan kewenangan kelembagaan sekolah yang terbebas dari dominasi negara yang berlebihan. Hal ini dalam rangka mewujudkan lahirnya generasi yang terbebas dari ideologi hegemonik kekuasaan serta terbebas dari praktek domestikasi. Sehingga pada gilirannya muncul sosok dan tipologi generasi bangsa yang merdeka, kritis dan berdaya baik secara ekonomi maupun politik.

### Ideologi Developmentalisme Orde Baru

Sebagaimana dinyatakan Kutut Suwondo (1998:82), bahwa keberlangsungan rejim Orde Baru dalam memerintah dan berkuasa lebih dari tiga

puluh tahun lamanya, di samping menggunakan basis legitimasi *material-ekonomi* seperti peningkatan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi serta legitimasi *formal-prosedural* seperti pemilu, mereka juga menggunakan legitimasi *ideologi*. Legitimasi yang disebut terakhir ini dilakukan dengan cara memproduksi sistem ideologi yang memungkinkan negara mempunyai kekuasaan hegemonik. Salah satu ideologi hegemonik Orde Baru adalah ideologi *developmentalisme* (*developmentalism ideology*).

Secara historis, sejak tahun 1970-an setelah rejim Orde Baru berkuasa, istilah '*pembangunan*' dan '*ideologi pembangunan*' telah menjadi semacam '*agama baru*'. Pembangunan telah menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan nasib hidup bangsa Indonesia yang telah porak poranda akibat kebangkrutan ekonomi peninggalan Orde Lama. Pembangunan yang dirancang oleh Orde Baru ini diadopsi dari konsep yang dikembangkan para ilmuwan sosial yang tergabung dalam "*Center for International Studies*" di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) yang kemudian disebarkan dan diterapkan ke hampir seluruh negara berkembang oleh IMF untuk membantu negara-negara dunia ketiga yang mereka katakan sebagai negara "terbelakang" (*underdevelopment*). Dari sinilah muncul paradigma pembangunan model Barat dimana pembangunan dipahami sebagai tahap demi tahap menuju terbentuknya "*modern society*". Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju.

Hasil kajian dan lokakarya para ahli ilmu sosial tersebut pada akhirnya terakumulasi teori-teori tentang pembangunan dan modernisasi. Diantara para ahli tersebut adalah W. W. Rostow yang menciptakan "*Teori Pertumbuhan*" dan juga David Mc. Clelland dan Alex Inkeles yang mengembangkan "*teori Modernisasi*" (Mansour Faqih, 1996:71).

Ada beberapa paham dalam teori modernisasi, diantaranya adalah paham modernisasi yang menekankan metafora "pertumbuhan" sebagaimana organisme mahluk hidup. Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan "tradisional" ke keadaan "modern". Asumsinya adalah, semua masyarakat pernah mengalami keadaan yang sama (tradisional), maka masyarakat dunia ketiga juga akan melewati perjalanan perubahan yang sama sebagaimana yang dilewati masyarakat Barat, yang akhirnya bisa menjadi masyarakat "modern". Paham modernisasi organisme inilah yang sangat terkenal dengan "skema lima tahap" (*five-stages scheme*) perkembangan masyarakat oleh Rostow. Menurut Rostow dan pengikutnya, bahwa perubahan akan berjalan bertahap dari yang bersifat tradisional menuju ke modern melalui proses tahap-tahap sebagaimana yang dijalani negara maju. Perkembangan yang diarahkan dengan model seperti ini menekankan proses pembangunan dengan cara "memperbesar modal" (*capital accumulation*) dalam bentuk "tabungan" dan "investasi". Dalam kaitan ini juga ditekankan perlunya elit swasta untuk merangsang proses pembangunan.

Penjelasan mengenai mengapa negara dunia ketiga termasuk Indonesia menjadi "miskin", dikarenakan kurangnya akumulasi modal untuk membiayai berbagai investasi. Karena itu untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan suntikan modal asing (bantuan luar negeri dan masuknya investor asing) guna memperbesar akumulasi modal untuk investasi pembangunan. Dengan demikian *surplus* akan diperoleh yang pada gilirannya dapat meningkatkan "pertumbuhan ekonomi" (*economic growth*).

Sedang paham modernisasi yang kedua adalah paham yang tidak melihat dari pendekatan ekonomik akan tetapi pada sosiologis dan psikologis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Mc. Clelland dan Alex Inkeles. Menurut Clelland,

untuk membangun suatu masyarakat supaya bisa menjadi masyarakat yang maju dan modern, maka individu-individu dalam masyarakat tersebut harus memiliki personalitas atau karakter manusia modern yang ia katakan sebagai memiliki "motivasi berprestasi" (*need for Achievement*).

Mengenai kenapa negara dunia ketiga menjadi "terbelakang", dijelaskan karena mereka tidak memiliki dorongan atau motivasi untuk berprestasi. Prototipe "masyarakat berprestasi" menurut paham kedua ini adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri perilaku seperti yang ada pada masyarakat kapitalis. Menurut Daniel Lerner, diantara ciri masyarakat berprestasi atau modern adalah: (1) adanya kemampuan berfikir yang rasional dan realistis, (2) adanya mobilitas dalam masyarakat dalam arti fisik, sosial, maupun psikologis, (3) adanya transformasi pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan kepada masyarakat hingga mereka mampu berfungsi efektif dalam tata masyarakat (Imam Barnadib, 1987:24).

Melalui lembaga keuangan internasional IMF atau yang dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*), teori-teori di atas diadopsi pemerintah Orde Baru untuk direalisasikan dalam wujud program pembangunan. Melalui pembangunan ini Orde Baru berusaha memperoleh dukungan (*legitimation*) rakyat dengan menjanjikan kemakmuran yang akan dicapainya. Sedangkan sosialisasi dan internalisasi ideologi developmentalisme ini dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu melalui: (a) regulasi, (b) media massa, dan (c) pendidikan/sekolah (Arinto Nurcahyono, 1999:88). Sehingga ideologi ini kemudian "membius" kepada hampir seluruh warga negara yang pada gilirannya membentuk sebuah struktur yang menghegemoni terhadap kesadaran warga negara termasuk para guru di sekolah.

Pada bagian lain, dalam developmentalisme kata '*pembangunan*' lebih bermakna dominasi untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol perubahan. Karena pembangunan diartikan sebagai perubahan yang terencana dan terkontrol (*planned and controlled change*). Sehingga dengan ideologi developmentalisme ini, rejim Orde Baru tidak saja melakukan kontrol terhadap kesadaran, tetapi juga melakukan pengendalian terhadap perilaku dan lingkungan fisik warga. Dalam konteks kehidupan sekolah, akan dianggap wajar ketika negara melakukan intervensi mulai dari penyusunan kurikulum, penentuan media, pendanaan, buku-buku yang harus diacu, cara dan gaya mengajar, sampai tipologi lulusan yang harus dihasilkan sekolah.

#### Revitalisasi Sumberdaya Sekolah

Menyimak dari potret dominasi negara atas sekolah yang sudah sedemikian kuat sebagaimana dipaparkan di atas, maka pada era reformasi dan era transisi sekarang ini sekolah-sekolah yang ada terbuka peluang untuk melepaskan diri dari dominasi kekuasaan politik negara. Sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ini memerlukan pemberdayaan (*empowerment*) atas segenap sumber yang dimilikinya termasuk pada keberdayaan politik. Upaya paling logis dari gerakan '*empowerment*' ini adalah dengan cara melanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan sekolah dan pada waktu yang sama dilakukan evaluasi dan identifikasi kembali terhadap segenap sumberdaya (*resources*) yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan secara optimal. Mengingat ada beberapa sumberdaya yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya oleh sekolah, sebaliknya ada sumberdaya yang berlebihan bahkan salah penggunaannya.

Sumberdaya yang dimiliki sekolah menurut beberapa ahli meliputi unsur-unsur seperti: kelembagaan, kepemimpinan/ manajerial, tenaga akademik, sarana prasarana, teknologi pembelajaran, kurikulum dan sumber belajar lain, dana dan anggaran, serta dukungan masyarakat. Segenap sumberdaya tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu: (a) dari perorangan (*privat*), dan (b) dari masyarakat (*sosial*), yang keduanya bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sekolah (Sumarno,1995:4). Sedangkan khusus sumberdaya sekolah yang berasal dari masyarakat bisa berupa: tenaga, keahlian, dana, program kepedulian, dan lain-lain dari masyarakat (Shofyanis,1996:6).

Keseluruhan sumberdaya sekolah tersebut dibutuhkan untuk diberdayakan dan dioptimalkan penggunaannya secara efektif demi kemajuan sekolah. Atau dalam perencanaan pendidikan dikenal dengan istilah 'pembangunan sekolah yang berbasis pada kebutuhan dan sumberdaya sekolah' (*school based development*).

Selama ini ada beberapa sumberdaya (*resources*) yang disalahgunakan atau digunakan tidak untuk sekolah antara lain seperti birokrasi sekolah. Hampir selama Orde Baru birokrasi sekolah atau birokrasi pendidikan pada umumnya telah digunakan penguasa sebagai alat pengendalian dan kontrol terhadap kekuatan kritis sekolah (Handoko 1994, Hadi Supeno1999). Unsur lain seperti kurikulum juga didesain tidak semata-mata untuk peningkatan bobot segenap hal termasuk '*subject matters*' yang hendak diberikan kepada siswa, akan tetapi lebih kepada pertimbangan 'proyek'.

Pada bagian lain, ada sumberdaya yang belum banyak dimanfaatkan sekolah adalah peranserta masyarakat. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 Bab II pasal (2) menyebutkan bahwa peranserta masyarakat difungsikan untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan



nasional. Konsep ini kemudian dimaknakan dan dikembangkan ke dalam istilah "*link and match*". Namun pada prakteknya, banyak terjadi distorsi aplikasi dimana hubungan kesenyawaan yang harmonis sebagaimana diharapkan antara sekolah dengan perusahaan atau instansi tertentu sebagai konstituen ternyata tidak terwujud. Bahkan dalam banyak kasus terjadi eksploitasi perusahaan atau instansi pemerintah terhadap siswa magang.

Dalam konteks ini yang penulis maksud dengan peranserta masyarakat adalah tidak sebatas pada menempatkan siswa magang di lembaga-lembaga pemakai, akan tetapi memiliki arti lebih jauh dengan cara melibatkan masyarakat beserta segenap potensinya untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu sekolah. Potensi masyarakat ini bisa berupa ide dan gagasan, dana, tenaga, serta hal-hal lain yang bisa disumbangkan untuk kemajuan sekolah.

#### Pemberdayaan (Politik) Sekolah

*Keberdayaan politik* dimaksudkan sebagai suatu kondisi terhadap adanya kepemilikan kewenangan politik. Sedang *kewenangan politik* diartikan sebagai hak moral untuk terlibat dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992:85). Adapun *keputusan politik* adalah semua produk hukum yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk itu yang bisa mengikat pada wilayah sasaran. Sehingga keberdayaan politik sekolah adalah suatu kondisi terhadap adanya hak moral untuk terlibat dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik, minimal untuk level pengaturan sekolah. Artinya dalam batas-batas tertentu, sekolah secara politis mempunyai kewenangan dan kekuasaan optimal untuk mengatur hal-hal yang menyangkut persekolahan.

Meskipun upaya revitalisasi sumberdaya sekolah telah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sebagaimana uraian di atas, namun bila tidak diimbangi dengan adanya keberdayaan politik bagi sekolah, maka upaya revitalisasi di atas tidak akan banyak membawa hasil. Sebab persoalan dasar persekolahan yang ada di Indonesia adalah tidak hanya pada persoalan kultural akan tetapi juga struktural. Tidak hanya terletak pada dimensi mikro akan tetapi juga pada skala makro.

Secara teoritis, indikasi akan banyak sedikitnya kewenangan politik seseorang atau kelompok ditandai oleh banyak sedikitnya sumber-sumber kewenangan yang dimiliki. Menurut Max Weber (George Ritzer, 1988:128-132), paling tidak ada tiga sumber kewenangan politik, yaitu: (a) kewenangan tradisional (*traditional authority*), (b) kewenangan kualitas pribadi (*charismatic authority*), dan (c) kewenangan legal (*legal authority*). Sumber kewenangan tradisional adalah kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara terus menerus yang mempercayai bahwa wewenang yang diperolehnya adalah warisan turun temurun. Sedangkan kewenangan karismatik bersumber pada wibawa individu atau kelompok yang dianggap memiliki kelebihan dibanding rata-rata manusia lainnya. Adapun kewenangan legal lebih bersumber pada aturan formal dan faktor rasional.

Bila sekolah berupaya memberdayakan diri dan meningkatkan keberdayaan politiknya, maka keberdayaannya tersebut ditandai oleh seberapa banyak sekolah memperoleh sumber kewenangan untuk menentukan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut sekolah. Baik menyangkut sumber tradisional, karismatik, serta legal. Salah satu contoh adalah adanya beberapa sekolah yang dengan berani mengambil kewenangan untuk merevisi dan menentukan kurikulum sekolah tanpa minta 'petunjuk' kepada

birokrasi negara (Depdiknas) dengan pertimbangan lokal dan rasional ; atau adanya sekolah yang secara tradisional memang tidak terkait dan tidak mengaitkan diri dengan urusan negara (sekolah di pesantren model *salaf*). Meskipun meningkatnya kewenangan tidak serta merta memberi jaminan pasti akan meningkatkan mutu sekolah; namun paling tidak secara politis akan mampu menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas lokal.

Oleh karenanya, manakala sekolah telah memiliki banyak sumber yang memungkinkan dan mengesahkan kewenangan untuk terlibat dalam proses-proses perumusan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut persekolahan, maka secara umum sekolah tersebut telah memiliki kewenangan secara politis. Dengan demikian sekolah dikatakan memiliki keberdayaan politik.

Persoalannya adalah, mayoritas sekolah-sekolah di Indonesia hampir tidak memiliki keberdayaan politik untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Baik yang menyangkut penentuan kurikulum, sistem evaluasi, media dan sumber belajar, kriteria keberhasilan, tipologi lulusan yang diinginkan, struktur kelembagaan, pakaian seragam, cara dan gaya mengajar, serta hal-hal lain hampir seluruhnya ditentukan oleh negara. Sehingga praktis tidak ada 'ruang' (*space*) yang tersisa bagi sekolah untuk melakukan aktualisasi dan improvisasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah-sekolah hanya mengikuti kehendak negara (klas dominan), (Escobar, 1998:29).

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan politik bagi sekolah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri adalah melalui dua mekanisme, yaitu: (a) menyakinkan kepada masyarakat publik termasuk juga kepada negara untuk memberikan otonomi dan memberlakukan desentralisasi pendidikan secara kongkrit melalui regulasi legal-rasional yang benar-benar mendorong untuk itu. (b) berani mengambil prakarsa rasional dan otonom dalam membangun sistem.

sekolah dan sistem pembelajaran yang bermutu. Dengan kata lain ada keberanian secara sadar bagi sekolah untuk mengambil prakarsa pendidikan yang mengarah pada praktek penyadaran dan humanisasi bukan praktek penindasan dan dehumanisasi (Paulo Freire, 2000: 175-180).

#### Menuju Terwujudnya Keberdayaan Bangsa

Setelah melalui upaya sistematis dalam rangka revitalisasi sumberdaya dan pemberdayaan politik sekolah di atas, maka akibat lanjut dari upaya tersebut adalah: *pertama*, pada konteks mikro, akan terjadi peningkatan kebermanfaatannya segenap sumberdaya sekolah yang tentu saja membutuhkan imbalan berupa peningkatan kecakapan personil sekolah untuk mendayagunakan sumberdaya itu demi kemajuan sekolah. *Kedua*, pada konteks makro, akan tercipta sebuah tatanan hubungan antara sekolah dengan segenap kepentingan eksternal (*external interest*) khususnya dari intervensi kekuasaan negara yang selama ini sangat membelenggu sekolah, lambat laun menjadi tereliminasi. Terciptanya kondisi sekolah yang terbebas dari segenap belenggu eksternal ini dapat disebut sebagai munculnya otonomi sekolah.

Meskipun banyak ahli mengakui bahwa dengan adanya eliminasi belenggu kekuasaan rejim atas sekolah *di satu sisi*, serta semakin meningkatkan kewenangan sekolah untuk mengatur rumah tangganya sendiri *di sisi lain*, bukan berarti serta merta akan mampu mendongkrak kemajuan sekolah menjadi spektakuler. Namun kompleksitas persoalan masih banyak menjadi kendala, seperti dinyatakan oleh Fullan and Stiegelbauer (Suyata, 2000:67) bahwa banyak kendala pembaruan sekolah khususnya di tingkat lokal antara lain: (1) waktu, pelatihan, dan bantuan teknis yang tersedia tidak memadai; (2) kesulitan merangsang kepedulian dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang kurang

mengenakkan; (3) adanya isu-isu yang belum terselesaikan yang melibatkan kepemimpinan administratif di *satu sisi* dan perluasan kekuasaan partisipan pada *sisi lain*; (4) hambatan-hambatan melibatkan guru dalam pengambilan keputusan.

Hal di atas terjadi mengingat selama ini, latar belakang sosio-kultural sekolah dan personilnya termasuk guru hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan dengan negara di *satu sisi*, serta masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan hidup yang kurang produktif dan inovatif oleh sekolah pada *sisi lain*. Namun melalui upaya-upaya internal dari para pioner di dalam sekolah, terutama sangat nampak pada sekolah-sekolah swasta di Indonesia, lambat laun akan membawa angin segar ke arah kemajuan sekolah.

Capaian kemajuan di atas baik pada level *mikro* maupun *makro* pada beberapa sekolah di Indonesia pada gilirannya diyakini dapat mempengaruhi dan memberikan kontribusi berarti pada peningkatan mutu sekolah secara agregat. Baik pada aspek manajemen kelembagaan, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, mutu layanan, serta yang terpenting adalah mutu "*out-put*" yang dihasilkan sekolah menjadi lebih baik. Sehingga dalam jangka panjang, akumulasi dari keberhasilan sekolah tersebut pada akhirnya akan mampu memberikan '*rate of return*' bagi tumbuhnya kualitas *individual*, kemajuan *ekonomi* serta peradaban masyarakat (*bangsa*). Sebagaimana disebutkan Bonsting (1985:52): "*education, in new paradigm, will be a process that encourages continual progress through the improvement of one's abilities, the expansion of one's interest, and the growth of one's character. Such an education would be good for the individual, good for the economy, and good for the commonwealth we call society*".

Dalam kadar tertentu, capaian kemajuan sekolah dengan menghasilkan tipologi lulusan manusia Indonesia yang berdaya bisa diartikan dapat mendukung terwujudnya masyarakat madani atau '*civil society*'. yaitu masyarakat yang

memiliki independensi sikap, mampu memajukan dirinya, serta dapat membatasi intervensi negara ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya sendiri (Ryas Rasyid, 1997:3-11).

#### Penutup

Dari uraian di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, selama era Orde Baru dunia pendidikan khususnya sekolah telah dikendalikan sedemikian kuat dalam segala urusannya oleh negara, baik yang menyangkut penentuan kurikulum, sistem evaluasi, media dan sumber belajar, kriteria keberhasilan lulusan, tipologi lulusan yang diinginkan, struktur kelembagaan, pakaian seragam, cara dan gaya mengajar, serta hal-hal lain yang seluruhnya ditentukan oleh negara. Sehingga praktis tidak ada 'ruang' (*space*) yang tersisa bagi sekolah untuk melakukan aktualisasi dan improvisasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Akibatnya, secara akumulatif dalam proses yang berkepanjangan sekolah menjadi tidak berdaya dan selalu tergantung kepada negara.

*Kedua*, Upaya pengendalian dan intervensi negara terhadap sekolah tersebut dilakukan dengan dalih pembangunan. Dengan ideologi *statist* yang dibingkai dalam kemasam *developmentalisme*, negara dengan leluasa melakukan apa saja terhadap sekolah dengan satu jargon '*pembangunan*' sebagai dasar legitimasinya. Ironisnya, kalangan pendidikan kurang ada yang berani memberikan koreksi terhadap berbagai distorsi penyelenggaraan kekuasaan di atas bahkan mereka terkesan merelakan dirinya menjadi alat kekuasaan negara.

*Ketiga*, dalam rangka memangkas dominasi negara atas sekolah yang berkepanjangan di atas, maka pada era reformasi sekarang ini sekolah membutuhkan keberdayaan politik, baik dalam konteks makro maupun mikro.

*Keempat*, pemberdayaan dalam *konteks makro* menyangkut pemangkasan (*cut off*) terhadap segenap urusan yang bukan menjadi wilayah urusan negara di sekolah. Satu-satunya urusan negara terhadap sekolah adalah memberikan dukungan finansial yang cukup untuk pengembangan sekolah, sedangkan masalah-masalah lain menjadi wilayah otonom sekolah. Sedangkan dalam *konteks mikro* menyangkut aspek-aspek internal, baik berupa pemberdayaan terhadap segenap asset dan sumberdaya lokal sekolah di *satu sisi* maupun pemberdayaan kecakapan personal sekolah untuk pengelolaan asset dan sumberdaya sekolah di atas di *sisi lain*.

*Kelima*, melalui berbagai upaya pemberdayaan politik sekolah tersebut, secara logis akan mendorong terbentuknya tipologi sekolah yang memiliki kekenyalan dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi segenap tantangan dan tuntutan masa depan. Demikian juga tipologi sekolah yang demikian diyakini akan mampu mewujudkan tipologi lulusan yang berkualitas yang pada gilirannya akan mampu mendorong secara agregatif terhadap terwujudnya keberdayaan bangsa dalam konteks interaksi dan kompetisi global.

#### Daftar Pustaka

- Arinto Nurcahyono. 1999. *Reformasi Kultural Orde Baru dalam Perspektif Postmodernisme*. Jurnal Ilmiah 'Unisia' UII No. 39/ XXII/ III/ 1999. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Bonsting, John Jay. 1985. *Creating Quality School*. American Association of School Administration. Virginia: Arlington.
- Escobar, Minguál. 1998. *Sekolah Kapitalisme yang Licik*. Yogyakarta: LKiS.
- Freire, Paolu. 2000. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ReaD.
- Hadi Supeno. 1999. *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.

- Handoko. 1994. *Dibutuhkan Guru yang Subversif*. Artikel Harian "Republika" Tanggal 25 Nopember 1994. Jakarta.
- Imam Barnadib. 1987. *"Pendidikan Perbandingan (Buku Dua)"*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kutut Suwondo. 1998. *Negara dan Civil Society: Kajian Teoritis dan Empiris Perkembangan Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmiah 'Kritis'. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mansour Faqih. 1996. *"Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial"*. Yogyakarta: Pustaka
- Mochtar Mas'ud. 1997. *"Politik, Birokrasi, dan Pembangunan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nezar Patria dan Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang *Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ritzer, George. 1988. *Sociological Theory: Fourth Edition*. New York: Mc.Grow Hill.
- M. Ryas Rasyid. 1997. *"Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan"*. Jurnal Ilmu Politik No.17. Jakarta.
- Shofyanis. 1996. *Penggalian dan Pemanfaatan Sumberdaya pendidikan dari Masyarakat*. Makalah Konvensi Nasional pendidikan 4-7 Maret 1996 di Ujung Pandang.
- Sumarno. 1995. *Sumberdaya pendidikan Sekolah Unggul*. Makalah Semiloka Sekolah Unggul oleh Pusbijadik Lemlit IKIP Yogyakarta bekerjasama dengan Direktorat Dikmenum dan Kanwil Pennas DIY, 4 Nopember 1995.
- Suyata. 1995. *Optimalisasi Efektifitas Sekolah Melalui Pemetaan Sosio-Akademik dan Penerapannya di SD Kabupaten Sleman*. IKIP Yogyakarta. (Laporan Penelitian).
-